

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi. (2010). *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group, Depok.
- Jimly Asshiddiqie. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Eksaminasi Putusan Hakim*. Komisi Yudisial RI, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. (1984). *Delik-Delik Khusus: kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo. (1996). *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. (2018). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Thomas III, George C. (1998). *Double Jeopardy: The History, the Law*. New York University Press, New York.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Criminal Justice Act 2003 (UK), c. 44, §§ 75–97 (2003).

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim*.

Strafprozessordnung [German Code of Criminal Procedure], § 362.

C. JURNAL, SKRIPSI DAN ARTIKEL ILMIAH LAINNYA

Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen* 5, No. 2: 45.

Fauzi, A. (2021). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 340 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Rencana Terlebih Dahulu (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Skt). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 45.

Fatimah, S. (2022). Pembuktian Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Kajian Terhadap Putusan Hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 67.

Ramadhan, R. (2020). Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 89.

Permata, D. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Perencanaan Terlebih Dahulu Dalam Delik Pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 55.

Arifin, Y. (2021). Kriteria Keadaan Tenang Sebagai Syarat Pemenuhan Unsur Perencanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang: 102.